

# **SKRIPSI**

## **PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD RI SUMSEL) DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



**NOVRI ERIK ROSANDY**

**07021281823061**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

# **SKRIPSI**

## **PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD RI SUMSEL) DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**NOVRI ERIK ROSANDY  
07021281823061**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam  
Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

**Novri Rosandy**

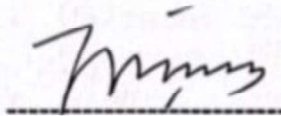
**07021281823061**

Pembimbing I

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA

NIP. 195907201985031002

Tanda Tangan



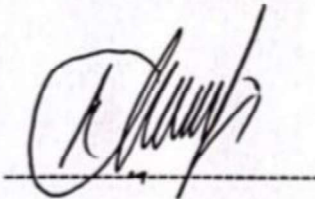
Tanggal

27-10-22

Pembimbing II

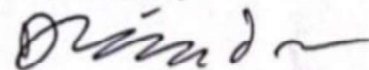
2. Randi, S.Sos., M.Sos

NIP. 199106172019031017



14-11-22

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si  
NIP. 1980021120312203

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI SUMSEL) Dalam  
Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan”**

Skripsi  
Oleh :  
Novri Erik Rosandy  
07021281823061

Telah dipertahankan di depan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 01 Desember 2022

Pembimbing :

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA  
NIP. 195907201985031002
2. Randi, S.Sos., M.Sos  
NIP. 199106172019031017

Tanda Tangan

Penguji :

1. Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si  
NIP. 196010021992032001
2. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos  
NIP. 198611272015042003

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan FISIP-UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si  
NIP. 198002112003122003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

**PERNYATAAN ORISIONLITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novry Rosandy

NIM : 07021281823061

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI SUMSEL) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 25 November 2022

Yang buat pernyataan,



  
NOVRY ROSANDY

NIM 07021281823061

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar” (QS. AL-Baqarah:153).
- “Allah tidak membebani seorang hamba-nya melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS.AL-Baqarah:286).

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papa dan Mama tercinta.
2. Sri Menanti yaitu Budeh yang sudah mengurusku selama di dunia perantauan
3. Adikku (Muhammad Aldiva Rosandy) dan kakak sepupuku ( Witanto Damayansyah)
4. (Meilisa Putri Triutami) yang telah banyak membantuku,memberikan doa, dukungan, nasihat, saran dan juga semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing skripsi bapak Dr.Zulfikri Suleman,. MA dan bapak Randi,S.Sos.,M.Sos
6. Sahabatku
7. Semua yang terlibat dalam penyusunan skripsi.
8. Almamater kebanggan Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan segala nikmat dan kesempatannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI Sumsel) dalam memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan”. Selanjutnya shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi agung kita, nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti hari ini. Skripsi ini diajukan dan ditulis sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk meraih gelar Sosiologi (S.Sos) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S-1) Universitas Sriwijaya.

Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan juga semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya, beserta jajaran pengurus Rektorat lainnya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si Selaku ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam pemenuhan syarat ujian skripsi.
4. Kedua orang tua, Papa Darmawandi B,Sc dan Mama Rosiana. Terimakasih atas doa dan perjuangannya. Papa dan Mama adalah sosok orang tua yang hebat dan sabar dalam menuntun langkah yang telah dilalui. Mohon maaf atas segala beban yang telah diberikan kepada kalian berdua, jasa dan pengorbanan kalian tidak mungkin dapat terbalaskan dan mohon maaf belum bias jadi anak yang baik. Sehat selalu dan panjang umur mama dan papa yang selalu ada buat anakmu ini doakan anakmu ini bisa sukses dan bisa membahagiakan kalian berdua.
5. Budeh, Sri menanti S.Pd., M,Si. Terimakasih sudah mengurus dan menggantikan sosok mama di dunia perantauan ini. Budeh adalah ayuk kandung dari papa yang telah membimbing saya selama jauh dari orang tua. Mohon maaf budeh jikalau saya selalu merepotkan dalam berbagai hal, Jasa dan kebaikan budeh tidak akan pernah terlupakan di dalam hidup saya. Semoga Budeh selalu sehat dan selalu bahagia.
6. Untuk adik kandungku Muhammad Aldiva Rosandy yang telah menjadi penyemangat saya untuk menulis Skripsi ini.

7. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos, MA selaku sekretaris jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam pemenuhan syarat ujian skripsi.
8. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Randi, S.Sos., M.Sos selaku dosen pembimbing 2. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan arahannya selama proses pembuatan skripsi. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
9. Bapak Dr. Ridha Taqwa selaku pembimbing akademik yang selalu senantiasa memberikan arahan dan motivasi tentang akademik pada penulis.
10. Seluruh Dosen Sosiologi dan staff serta karyawan Fisip UNSRI, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis.
11. Mbak Yuni Yunita, S.Sos selaku admin jurusan yang selalu siao siaga membantu dalam mengurus administrasi dan proses penyusunan skripsi.
12. Kepada kekasihku (Meilisa Putri Triutami) yang telah mewarnai hidup penulis sekaligus memberi dukungan, nasihat, doa, saran, dan menjadi penyemangat penulis untuk membuat skripsi ini.
13. Kepada Sahabatku BGOT (Bunga, Putri, Dela, Cestri, Sophia, Alep, Yusuf, Ricky, Raja) yang telah mewarnai hidup penulis selama kuliah, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesabaran kalian selama ini.
14. Kepada Guru ku yang sudah seperti orang tua (Sir Firza) Terimakasih Sir yang telah banyak membantuku,memberikan doa, dukungan, nasihat, saran dan juga semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada sohibku (Rananta, Ricky, Raja, Arif, Daffa) yang selalu mendengarkan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih.
16. Kepada Kku Wd Chandra, terimakasih sudah mengajarkan tentang kedewasaan dalam kehidupan,sudah memberi relasi agar penulis bisa cepat selesai dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Kepada Lendra terimakasih atas bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi.
18. Seluruh informan dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarnnya karena sudah bersedia menceritakan pengalamannya saat di wawancara, sehingga penulis bisa mendapatkan data yang dibutuhkan selama penelitian ini.
19. Kepada seluruh anggota/pegawai DPD RI Sumsel yang sudah bersedia membantu memberikan informasi dalam penelitian penulis
20. Organisasi BEM FISIP UNSRI, seluruh anggota dan seluruh jajaran Badan Pengurus Harian Kabinet Adikarya, terimakasih untuk kebersamaannya.
21. Organisasi SSF UNSRI, terimakasih banyak untuk kebersamaan yang telah dilalui, semoga kedepan akan dimudahkan semua urusannya.



22. Organisasi HIMABAJAJ (Himpunan Mahasiswa Banten Jawa) Terimakasih banyak telah menjadi organisasi kedaerahan yang sangat merangkul kami dari awal masuk Universitas Sriwijaya hingga sampai saat ini.
23. Kepada teman-teman Sosiologi 2018, terutama anak-anak kelas ganjil yang sangat emosional yang telah memberikan kenangan yang paling indah selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat di perlukan demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut. *Aamin Yaa Robbal'amin, Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, November 2022

Penulis

Novri Erik Rosandy

NIM. 07021281823061

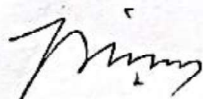
## RINGKASAN

Pada penelitian ini membahas “ Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI SUMSEL) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan. Masalah penelitian membahas bahwa masih banyak aspirasi yang ada di daerah Sumatera Selatan yang belum terealisasi, sehingga pentingnya keterlibatan anggota DPD RI Sumsel dalam penyelesaian masalah daerahnya dengan tepat sasaran. Strategi yang dapat dilakukan anggota DPD RI Sumsel pada kondisi tersebut ialah menampung dan menyalurkan aspirasi daerah dan di perjuangkan di tingkat pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI SUMSEL) dalam memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam pada 10 informan, dokumentasi dan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis menggunakan teori peran dari Katz dan Kahn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota DPD RI Sumsel dalam memperjuangkan kepentingan daerah itu dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kerja anggota DPD RI Sumsel mulai dari komite 1,2,3,4. Hak dan kewajiban anggota DPD RI Sumsel dalam memperjuangkan harus bertolak ukur dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Faktor pendukung yang membantu anggota DPD RI Sumsel yaitu bantuan tim internal dan eksternal, masyarakat, teknologi dan relasi. Faktor penghambat yang menghalangi anggota DPD RI Sumsel yaitu terbatasnya keuangan anggaran, jarak tempuh, kewenangan untuk memutuskan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Peran anggota DPD RI Sumsel, Kepentingan Daerah, Sumatera Selatan

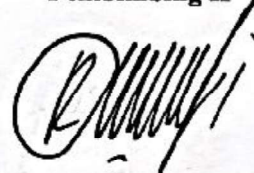
Indralaya, 01 November 2022  
Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I



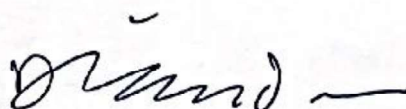
**Dr. Zulfikri Suleman, MA**  
NIP. 195907201985031002

Pembimbing II



**Randi, S.Sos., M.Sos**  
NIP. 199106172019031017

**Ketua Jurusan Sosiologi**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si**  
NIP. 198002112003122003

## SUMMARY

*This study discusses "The Role of Members of the Regional Representative Council (DPD RI SUMSEL) in Fighting for the Regional Interests of South Sumatra. The research problem discusses that there are still many aspirations in the South Sumatra region that have not been realized, so it is important to involve members of the South Sumatra DPD RI in solving regional problems with the right target. The strategy that can be carried out by South Sumatra DPD RI members in these conditions is to accommodate and channel regional aspirations and be fought for at the central level. The purpose of this research is to understand the role of members of the Regional Representatives Council (DPD RI SUMSEL) in fighting for the interests of the South Sumatra region. The research method used is qualitative through observation, in-depth interviews with 10 informants, documentation and literature study, then analyzed using the role theory of Katz and Kahn. The results of this study indicate that the role of DPD RI Sumsel members in fighting for the interests of the region is divided into 2, namely the division of labor for DPD RI Sumsel members starting from committee 1,2,3,4. The rights and responsibilities of DPD RI Sumsel members in fighting for them must be measured against the laws that have been stipulated. Supporting factors that help DPD RI Sumsel members are internal and external team assistance, society, technology and relations. The inhibiting factors that hinder DPD RI South Sumatra members are limited budget finances, distance traveled, authority to decide on people's aspirations at the regional level.*


**• Keywords:** *The role of South Sumatra DPD RI members, Regional Interests, South Sumatra*

Indralaya, 01 November 2022  
Mengetahui/Menyetujui

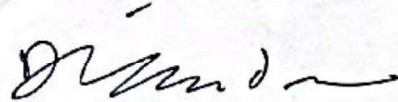
*Advisor I*

  
**Dr. Zulfikri Suleman, MA**  
NIP. 195907201985031002

*Advisor II*

  
**Randi, S.Sos., M.Sos**  
NIP. 199106172019031017

**Head of Sociology Department**  
**Faculty of Social and Political Sciences**  
**Sriwijaya University**

  
**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si**  
NIP. 198002112003122003



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	8
2.2 Kerangka Pemikiran .....	14
2.2.1 Peran.....	14
2.2.2 DPD RI Sumatera Selatan.....	15
2.2.3 Aspirasi Daerah Sumatera Selatan.....	16
2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
3.1 Desain Penelitian.....	18
3.2 Lokasi Penelitian .....	19
3.3 Strategi Penelitian.....	19
3.4 Fokus Penelitian .....	19
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	20
3.6 Kriteria dan Penentuan Informan .....	21
3.7 Peran Peneliti.....	21
3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.9 Unit Analisis Data .....	23
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	24

3.11 Teknik Analisis Data .....	24
3.12 Jadwal Penelitian .....	27
<b>BAB IV GAMBARAN LOKASI DAN GAMBARAN INFORMAN.....</b>	<b>28</b>
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan .....	28
4.2 Profil Instansi DPD RI Sumatera Selatan.....	31
4.3 Fungsi, Tugas, Dan Wewenang DPD RI Sumsel .....	34
4.3.1 Fungsi .....	34
4.3.2 Tugas Dan Wewenang.....	35
4.4 Denah Gedung Dan Struktur Organisasi DPD RI Sumsel .....	36
4.5 Gambaran Informan.....	37
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
5.1 Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan .....	42
5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan .....	58
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Sumatera Selatan Periode 2019-2024 .....	2
Tabel 1. 2 Laporan Kegiatan di Daerah Sumatera Selatan 2019-2021 .....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	27
Tabel 4. 1 Daftar Kabupaten Dan Kota Di Palembang.....	29
Tabel 4. 2 Daftar Informan Utama .....	38
Tabel 4. 3 Daftar Informan Kunci.....	39
Tabel 4. 4 Daftar Informan Pendukung.....	41
Tabel 5. 1 Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan.....	56
Tabel 5. 2 Faktor Pendukung dan Penghambat Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	17
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	29
Gambar 4. 2 Logo DPD RI Perwakilan Sumsel.....	31
Gambar 4. 3 Denah Gedung.....	36
Gambar 4. 4 Bagan Struktur Organisasi DPD RI SUMSEL.....	37
Gambar 5. 1 Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan .....	43
Gambar 5. 2 Faktor Pendukung dan Penghambat Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga perwakilan yang lahir dari sistem feodal yaitu sistem yang memberi kekuasaan pada bangsawan dinilai sangat penting baik suatu negara, baik itu negara demokrasi ataupun tidak. Keberadaan suatu lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat memiliki peran yang sangat penting sama halnya dengan pemerintahan pusat. Peran penting tersebut memberikan peluang bagi pemerintahan daerah untuk dapat mandiri dalam mengelola daerahnya masing-masing di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut otonomi daerah. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah bagi masyarakat Indonesia tidak hanya berada di pusat, namun juga tersebar keberbagai daerah. Namun sangat disayangkan, kebijakan otonomi daerah belum maksimal dimanfaatkan dan dikembangkan oleh lembaga perwakilan yang dinilai sebagai sosok yang penting pada daerah tersebut (Wasti, 2017)

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau, maka diperlukannya suatu sinergi pada setiap daerah atau wilayah untuk menjalin suatu kerjasama yang baik untuk pembangunan Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang di identikan sebagai utusan daerah seharusnya menjadi harapan besar dalam keberlangsungan otonomi daerah yang sesuai cita-cita dari proklamator terdahulu. Menurut Pardede (2020) bahwa gagasan dasar dalam pembentukan DPD adalah untuk mempermudah pada suatu daerah dalam mengelola daerah dan proses pengambilan keputusan politik untuk kepentingan daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar daerah untuk mengelola dan mengambil keputusan daerahnya masing-masing.

Dewan Perwakilan Daerah memiliki kedudukan yang strategis karena sebagai pihak yang menampung aspirasi masyarakat atau pihak yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan permasalahan pada daerahnya kepada pemerintahan tingkat pusat untuk pembangunan daerahnya. Tugas DPD sebagai lembaga pemerintahan yang menampung semua aspirasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar. DPD harus dan wajib

menjunjung tinggi transparansi dan demokrasi bagi daerah, agar selaras dengan Pancasila. Menurut Isnawan (2002), bahwa Dewan Perwakilan Daerah menjadi perwajahan bagi demokrasi Indonesia, untuk itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik, mendengarkan semua aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan untuk kepentingan daerah.

**Tabel 1. 1**

**Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Sumatera Selatan Periode 2019-2024**

No	Nama Anggota	Alat Kelengkapan Utama	Bertugas
1	Jialyka Maharani	Komite 1	Bertugas untuk mengelola otonomi daerah, penataan ruang, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengembangan daerah.
2	Amalia Sobli S.KG	Komite 2	Bertugas untuk mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi.
3	Hj. Eva Susanti	Komite 3	Bertugas untuk mengelola aspek pendidikan, kebudayaan, kesehatan, agama, pariwisata, dan kesejahteraan sosial.
4	Arniza Nilawati, S.E, M.M	Komite 4	Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK, pajak, dan UMKM.

*Sumber: DPD RI Sumatera Selatan, 2021.*

Data pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa anggota DPD memiliki kesempatan untuk tampil berbeda karena tidak terikat dengan sikap partai politik, sebagaimana anggota DPR. Anggota DPD RI Sumatera Selatan secara keseluruhan diduduki oleh kaum perempuan. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi kaum perempuan di perpolitikan Indonesia tanpa memandang status gender. Oleh karena itu, hadirnya DPD menjadi suatu kebutuhan suatu daerah. Menurut Muktar Pakpahan (2016), bahwa pertama kali terdapat dua perwakilan daerah di parlemen yaitu DPR wakil politik dan DPD wakil daerah. Proses pemilihan pada DPD murni langsung dari rakyat. DPD harapannya dapat menjadi produk reformasi di Indonesia agar dapat menjadi penyeimbang dan penyalur aspirasi daerah yang berlandaskan konstitusi nasional.

Jumlah anggota DPD di Sumatera Selatan hanya empat orang sehingga itu dinilai tidak akan maksimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Aturan

tentang DPD tidak memperhitungkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diwakilkannya. Seluas apa pun penduduk, jumlah anggota DPD yang mewakili tetap sama. Tidak heran bila ada yang menilai, DPD itu antara ada dan tiada.

DPD sebagai lembaga legislatif di tingkat pusat tentunya menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi ke pusat agar memperoleh suatu keputusan yang mementingkan pembangunan kebutuhan daerah. Pembangunan yang berhasil pada suatu daerah dibutuhkannya suatu peran DPD untuk menyampaikan aspirasinya untuk perubahan daerah dari segi pembangunan. Aspirasi dalam perpolitikan menjadi poin yang penting dalam penentuan suatu kebijakan yang mengarah pada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah, namun masyarakat tentunya harus tetap mengawasi DPD dengan melihat apakah aspirasi, dukungan dan pengawasan telah tersalurkan dengan baik ataupun sebaliknya (Manan, 2001)

Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai bab baru tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang dalam pasal 22 C dan 22 D. Pasal 22 C berbunyi bahwa (1) setiap DPR yang terpilih disetiap provinsi atas dasar pemilihan umum. (2) pada setiap provinsi anggota DPD jumlahnya sama, namun jumlah DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. (3) tugas anggota DPD selama setahun paling sedikit sekali dalam melaksanakan sidang. (4) kedudukan dari setiap DPD sudah diatur dalam Undang-Undang. Sementara itu, untuk pasal 22 D berbunyi bahwa (1) setiap DPD boleh mengajukan kepada DPR untuk terlibat dalam perancangan Undang-Undang, tentunya yang berkaitan dengan daerah mulai dari pembentukan, penggabungan, pemekaran, pemanfaatan sumber daya alam dan berhubungan dengan pertimbangan keuangan daerah. (2) Setiap DPD Dewan bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan undang-undang mulai dari otonomi daerah, pemekaran, penggabungan daerah dan pembentukan daerah, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendidikan, pajak, dan agama. Dari pengawasan tersebut untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan bahan pertimbangan yang perlu ditindaklanjuti. (3) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila melanggar aturan yang telah tertuang dalam undang-undang.



Dasar hukum keberadaan dari DPD tertuang pada pasal 22 C dan D UUD 1945. Namun, terjadinya permasalahan dalam Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) hingga saat ini keberadaan pasal tersebut tidak mengakomodir keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Secara garis besar beberapa pasal dinilai memberikan posisi yang lebih tinggi antara DPR ketimbang DPD, contohnya pasal melakukan pemeriksaan DPR harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan DPR, sedangkan untuk DPD tidak secara demikian. Selain itu, terdapat juga pasal mendapatkan sanksi bagi anggota DPD apabila 6 kali secara berturut-turut tidak hadir sidang paripurna, sedangkan untuk DPR pasal tersebut ditiadakan. Pasal yang mewajibkan dan wewenang bagi DPR ialah menyusun anggaran, sedangkan DPD tidak mendapatkan wewenang tersebut. Menurut Unsika (1992), menyatakan perjalanan dari anggota DPD secara langsung sebagai representasi bagi masyarakat sekitar dengan menjunjung tinggi konstitusi untuk menampung semua aspirasi, mencari solusi dan menyelesaikan masalah.

**Tabel 1. 2**  
**Laporan Kegiatan di Daerah Sumatera Selatan 2019-2021**

No	Komite	Jenis Kegiatan
1	Komite 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang nomor 36 tahun 2007 tentang penataan ruang.</li> <li>- Pengawasan atas pelaksanaan pertanahan di daerah.</li> </ul>
2	Komite 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan mengenai kehutanan</li> <li>- Pengawasan mengenai cipta kerja yang sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020.</li> </ul>
3	Komite 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan perlindungan pekerja migran Indonesia nomor 1 tahun 2021.</li> <li>- Implementasi undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di daerah dalam meningkatkan budaya membaca.</li> </ul>
4	Komite 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pengawasan atas pelaksanaan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara difokuskan pada pengelolaan aset dan BMD.</li> <li>- Keuangan negara difokuskan pada APBN tahun 2021/tranfer ke daerah dan dana desa.</li> </ul>

*Sumber: DPD RI Sumatera Selatan, 2021.*

Menurut Harwati (2018) anggota Dewan Perwakilan Daerah memiliki komponen diantaranya mulai dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan adanya pemerintahan daerah yang ikut menyuarakan kepentingan daerah terkhusus Sumatera Selatan. Peran serta anggota dewan perwakilan daerah dari

Sumatera Selatan, secara implementasinya belum maksimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Terdapat 2 faktor yang menghambatnya, yaitu (1) faktor internal; lembaga dewan perwakilan daerah menjadi penghambat dalam bekerjanya DPD disuatu daerah. (2) faktor eksternal; luaran seperti masyarakat, peraturan daerah atau Undang-Undang atau konstitusi dan pemerintah daerah dapat menjadi penghambat DPD dalam memperjuangkan daerahnya. Untuk itu hal-hal yang perlu diupayakan dalam mengakomodasi kepentingan daerah dengan meminimalisir kendala yang terjadi pada baik internal maupun eksternal melalui meningkatkan peran serta anggota DPD Sumatera Selatan, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah Sumatera Selatan.

Penerapan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan, hubungan antara pusat dan daerah, dan aspek lainnya dari keterwakilan daerah semua hal tersebut dilaksanakan berdasarkan landasan Undang-Undang. Keterlibatan anggota DPD dalam pembentukan Undang-Undang hanya sampai pengajuan kepada DPR dan tidak memiliki kekuasaan lebih dalam penetapan dan mengundangkan. Menanggapi hal tersebut diperlukannya suatu intergrasi yang kokoh pada suatu negara dalam menerapkan otonomi daerah dengan bertujuan untuk pemerataan pembangunan secara efektif dan efisien tanpa kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan. Menurut Pardede (2020), pemberlakuan otonomi daerah dengan menerapkan satu kesatuan yang utuh agar tercapainya daerah yang kokoh dan terwujudnya desentralisasi sehingga akan menghasilkan keutuhan bagi NKRI dalam aspek kewilayahannya.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi percontohan dalam program lintas bidang dengan target menurunkan emisi dari lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi (transportasi), industri dan limbah. Namun, dalam hasil pengawasan di lapangan masih ditemukannya *illegal logging* di daerah Sumatera Selatan tanpa adanya izin kepada bidang kehutanan. Oleh karena itu, peran dari anggota DPD sangat penting dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang kehutanan dan cipta kerja.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, bahwa pentingnya keterlibatan dari Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Selatan dalam penyelesaian masalah daerahnya dengan tepat sasaran. Dalam penyelesaiannya, diperlukannya

suatu kerjasama antar daerah dalam skala nasional agar memperoleh masukan yang dapat dipertimbangkan dalam pembangunan di provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah utama yang akan muncul pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan”**. Adapun dari rumusan masalah tersebut, berikut dipaparkan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana peran anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat peran anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui peran anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan untuk penulisan metode penelitian yang terkait.
2. Penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dalam ilmu sosiologi politik dan sosiologi organisasi yang membahas tentang peran anggota dewan perwakilan daerah (DPD) Sumatera Selatan dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lain dalam penulisan-penulisan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem politik di Indonesia.
2. Sebagai rujukan kepada pemerintah Sumatera Selatan.
3. Bagi DPD RI Sumsel untuk lebih aktif lagi dalam menyampaikan aspirasi daerah Sumsel agar dapat diperjuangkan ke tingkat pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Katz, D., & Kahn, L. (1978). *The Social Psychology of Organization*. Kota Bogor: PT Grafindo Persada
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm 408.
- Moleong, John Lexy. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Maliki, Z. (2016). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

### **Jurnal:**

- Bukhari (2015). Kedudukan dan Fungsi DPD Dalam Sistem Parlemen Bikameral Indonesia. *Jurnal Independent*, 350–364.
- Kahn, K. (1964). Teori Peran Menekankan Sifat Individual Sebagai Pelaku Sosial.
- Wasti (2017). Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Pardede (2020). Peran Anggota DPD RI Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Daerah
- Darma, M. (2016). Pentingnya Keberadaan DPD RI Sebagai Lembaga Penyeimbang Di Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.407>
- Isnawan (2002). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah.
- Muktar Pakpahan (2016), DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia.
- Harwati (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.
- Dwi, R. C. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Dan Kedudukan Dewan



Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

- Hakim, S. D. (2007). Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bogdan Dan Taylor (2010). J Moleong Lexy (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Fahrazi, M. H. (2019). Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Dan Pengawasan Dpd Ri Berdasarkan Uud Nri Tahun 1945. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(April), 14–23.
- I Ketut Suardita. (2016). *Kedudukan dan Peran DPD dalam Fungsi Legislasi dan Anggaran*. 1–9.
- Iskandar. (2020). *Peran dan Fungsi DPD RI*. 8(3), 436–442.
- Manan, F. (2017). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *CosmoGov*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11860>
- R. Herawati. (2010). Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Law Reform*, 3(2), 60-81.
- Ratna. (2015). Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). 43(March), 1–9.
- Reza, F. (2019). DPD sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi. *Media Syari'ah*, 21(1), 41–51.
- RI, S. J. D. (2017). Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2016-2017.
- Setio, S. E. (2013). Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1–16.
- Sipangkar, L. F. L. D. P. D. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (*Strengthening the Legislative Function of Regional Refresentative Council*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 3 (2016): *Jurnal Legislasi Indonesia-September 2016*, 235–240. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/146>
- Thalib, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945. *UIR Law Review*, 1(1), 49–62.

- Wasti, R. M. (2018). Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 439. <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1587>
- Widodo, W. (2014). Peran Dan Fungsi Dpd Ri Dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral Yang Efektif Melalui Amandemen Uud 1945 Ke-5. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1462>
- Sukmadinata. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya (2011).
- S. Nasution (1988). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito (1988)